SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

PLANNING AND BUDGETING INFORMATION SYSTEM IN BANDUNG GOVERNMENT

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan pada
Program Studi Sistem Informasi Beasiswa Unggulan Jenjang S1 (Strata Satu)
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Oleh :

WILLY MUHAMMAD RIZAL

1.05.13.170



PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

BANDUNG

2017

ABSTRACT

In running the government, Bandung via Bappelitbang (stats Agency, Research and Development) conducted a series of planning and budgeting activities. A series of planning and budgeting activities is in practice often encounter problems, especially in the integrity of the data. The problem is based on the authors intend to conduct research to develop a more integrated system in stages perencenaan and budgeting. This is important because good planning and budgeting will give good results when the governance process is executed.

The design study will be conducted using the descriptive method in which the author examines the circumstances or the current system with the data collection methods used were interviews and observations. The system to be developed has the complexity and scope large enough so that it will be easier when the author uses the method object approach to system development methods using the prototype for the system according to what is expected.

This study resulted in an information system application development planning and budgeting in Bandung City Government is able to offer a solution for planning and budgeting

.

Keyword: Planning, Budgeting, Musrenbang, Reses, APBD, RKPD

I. Pendahuluan

Latar Belakang

Pemerintah pusat saat ini telah mengusung konsep otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan perbantuan. Dari landasan hukum tersebut, setiap pemerintah daerah memiliki visi masing-masing yang diwujudkan dalam bentuk misi. Dalam pelaksanaan misi ini diperlukan sebuah perencanaan matang untuk mencapai visi pemerintah daerah itu sendiri. Rencana-rencana yang dibuat perlu disusun secara seksama karena rencana ini dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas negara.

Sudah menjadi hal yang pasti bahwa diperlukan anggaran dalam pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Maka, sangatlah penting ketika ada proses perencanaan dalam sebuah instansi, terlebih itu adalah instansi pemerintah, harus dibarengi dengan rencana penganggarannya, sehingga tidak hanya perencanaan yang harus dilakukan secara seksama tetapi proses penganggaran pun harus dilakukan semaksimal mungkin. Hal ini diperkuat oleh Izzetin (1979) yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran yang baik harus mempunyai karakteristik sebagai berikut: partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan tingkat kesulitan anggaran. Oleh karena itu, untuk dapat merancang perencanaan dan penganggaran pemerintah diperlukan sistem yang memadai.

Kota Bandung merupakan salah satu pemerintah daerah yang tentunya telah melakukan proses perencanaan dan penganggaran. Proses perencanaan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dilakukan oleh perangkat daerah teknis Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam perencanaannya, terdapat sedikitnya dua sumber perencanaan, yaitu sumber perencanaan yang berasal dari internal, dalam hal ini adalah pimpinan atau perangkat daerah dan sumber perencanaan yang berasal dari eksternal, yaitu usulan yang bersumber dari masyarakat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua sumber ini harus mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RPJMD ini merupakan perencanaan pembangunan pemerintah daerah selama satu periode.

Rencana yang bersumber dari internal tidak terlalu sulit untuk dikelola karena sumber rencana ini berasal dari dalam pemerintah Kota Bandung itu sendiri. Berbeda dengan sumber yang berasal dari pihak luar pemerintah Kota Bandung, rencana yang diusulkan harus dikelola sedemikian rupa. Usulan dari pihak luar Kota Bandung sendiri, dibagi menjadi dua usulan yaitu usulan yang berasal dari masyarakat dan usulan yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Usulan dari masyarakat ditampung dalam satu aktivitas, yaitu musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), sedangkan usulan dewan disebut dengan reses.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa proses perencanaan pembangunan harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan. Musrenbang adalah hasil *assesment* paling penting terhadap usulan program yang prioritas dari masyarakat. Karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi.

Baik musrenbang maupun reses telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, bahkan telah dikelola dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan penggunaan sistem informasi pada dua aktivitas tersebut. Musrenbang *online* dan reses *online* yang telah dikembangkan Bappelitbang menjadi salah satu contoh bahwa Kota Bandung memang serius untuk menjadi salah satu pelopor *smart city* di Indonesia.

Kedua sumber rencana pemerintah Kota Bandung ini pada akhirnya dituangkan ke dalam satu dokumen, yaitu RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah). Sama halnya dengan musrenbang dan reses, pembuatan RKPD ini telah menggunakan sistem informasi yang disebut dengan RKPD *online*. Namun sangat disayangkan, ketika ketiga aktivitas perencanaan diatas telah dilaksanakan menggunakan sistem informasi dengan baik, namun dalam hal rekapitulasi data dan *transfer* data masih dilakukan secara konvensional. Apa yang telah menjadi usulan masyarakat dan dewan harus dimasukkan kembali ke dalam sistem RKPD *online*, sehingga tidak sedikit terjadi perubahan apa yang diusulkan masyarakat dan dewan. Hanya sebagian kecil usulan yang terealisasi bahkan tidak terealisasi sama sekali dalam rencana kerja. Selain itu, masyarakat tidak tahu sejauh mana usulan mereka diapresiasi atau diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bandung.

Rencana-rencana di dalam RKPD ini selanjutnya disebut dengan kegiatan dimana terdapat anggaran didalamnya. Saat ini yang terjadi di pemerintah Kota Bandung, kegiatan-kegiatan di atas diberikan anggaran yang disebut dengan pagu indikatif. Pagu ini berdasarkan pada data historis dan juga asumsi masing-masing perangkat daerah. Faktanya, dengan menggunakan konsep pagu indikatif di setiap kegiatan, kurang memberikan keberpihakan terhadap masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan belanja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan kegiatan yang direncanakan dan hal ini terus menerus dilakukan karena menjadi data historis dan menjadi budaya yang terus dilakukan.

Pada akhirnya, RKPD yang dibuat pemerintah Kota Bandung akan disetujui dewan untuk selanjutnya direalisasikan. Tetapi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, terdapat beberapa tahapan untuk menjadikan RKPD ini terealisasi. Setelah tahapan RKPD ini selesai, perlu juga dibuat dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS ini memuat juga tentang perencanaan. Tetapi berbeda dengan RKPD yang hanya memuat perencanaan kegiatan atau belanja langsung, KUA membahas juga pendapatan, pembiayaan dan belanja tidak langsung yang didalamnya terdapat berbagai komponen, seperti gaji pegawai, hibah, bantuan sosial, dan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, KUA dan PPAS ini masih dibuat dengan metode konvensional, karena memang belum memiliki sistem informasi. Sehingga kadang terjadi perubahan yang signifikan antara RKPD dengan dokumen KUA dan PPAS.

Sama halnya dengan RKPD, KUA dan PPAS ini dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketika kedua dokumen ini telah disepakati antar pihak eksekutif dan legislatif, selanjutnya kegiatan ini akan dirinci. Artinya, mengisi rencana kegiatan yang dibuat dengan belanja-belanja yang mendukung kegiatan tersebut. Proses perincian ini tidak bisa melebihi pagu yang ditetapkan pada tahapan sebelumnya. Memang sudah tersedia sistem dalam melakukan perincian rencana kegiatan ini, tetapi dalam prosesnya tidak dapat dilakukan pengontrolan. Pengontrolan ini dilakukan oleh perangkat daerah teknis, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sulitnya dilakukan pengontrolan karena sistem yang dibuat masih secara *offline*, sehingga banyak belanja yang memang tidak sesuai dengan rencana kerja. Definisi ketidaksesuaian ini adalah apa yang dibelanjakan tidak mendukung ketercapaian rencana kegiatan.

Tahapan perincian rencana kerja ini menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. Dokumen ini memuat rencana dan anggaran kegiatan. Rencana ini memiliki indikator kegiatan yang merupakan visi dari kegiatan tersebut. Dan anggaran didalamnya, memuat apa saja yang dibelanjakan. Visi yang tertera lewat indikator kegiatan ini direalisasikan dengan belanja yang dianggarkan. Analoginya, jika suatu kegiatan memiliki satu visi, maka perlu dilakukan belanja yang mendukung ketercapaian visi tersebut. Pada akhirnya, dokumen RKA ini dijadikan acuan dalam pembuatan rancangan APBD hingga APBD itu ditetapkan. Terakhir, pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang nantinya akan dijadikan dasar dalam penatausahaan pemerintah Kota Bandung.

Bersumber dari skema yang dibuat Bappelitbang diatas, terdapat tiga belas proses yang harus dilalui. Ketiga belas proses ini menggunakan empat sistem informasi yang tersedia dimana masing-masing sistem berdiri sendiri dan tidak terintegrasi. Setiap perpindahan tahapan dilakukan secara konvensional, sehingga dipastikan terjadi resistensi data. Antara usulan masyarakat hingga pelaksanaan, tidak dalam satu frekuensi yang sama. Selain itu, sistem yang dimiliki tidak dapat mengontrol, baik dalam tahap perencanaan maupun tahap penganggaran. Karena sulitnya proses pengontrolan berimbas pada sulitnya dalam melakukan perbandingan di setiap tahapan.

Setelah mempelajari dan mengamati permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan setiap proses yang ada agar data yang diolah memiliki kualitas yang baik. Selain itu, diperlukan juga sistem yang dapat mengontrol di setiap tahapannya agar apa yang telah direncanakan secara baik, dianggarkan pula dengan belanja yang memiliki keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan solusi atas permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan memilih judul "**Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah di Pemerintah Kota Bandung**".

Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada pada perencanaan dan penganggaran daerah di Pemerintah Kota Bandung, dimana masalah-masalah tersebut diantaranya:

1. Dalam proses perencanaan dan penganggaran yang terjadi sebelum dilakukan penelitian ini terdapat beberapa aplikasi yang berdiri masing-masing dan tidak terintegrasi sehingga dalam implementasinya menyebabkan resistensi data sehingga terjadi inkonsistensi data.
2. Belum adanya sebuah sistem yang mampu mengontrol belanja pada setiap tahapan sehingga pada prosesnya terdapat belanja-belanja yang tidak memiliki keberpihakan terhadap masyarakat.
3. Pada aplikasi yang digunakan ketika tahapan perencanaan dan penganggaran memiliki basis yang berbeda, artinya memiliki struktur dan antarmuka masing-masing sehingga pengguna perlu juga masuk ke dalam sistem berkali-kali.
4. Pemanfaatan jaringan pada proses ketika penelitian ini belum dikembangkan memiliki arsitektur yang berbeda-beda. Pada aplikasi yang berbasis *web* arsitekur jaringan menggunakan metode *client server.* Sedangkan ada aplikasi yang berbasiskan *desktop* menggunakan metode *stand alone.*
5. Aplikasi yang digunakan ketika tahapan perencanaan masih menggunakan pagu indikatif untuk setiap belanjanya yang pada tahapan penganggaran akan dirinci apa yang dibelanjakan. Dikarenakan sistem yang terpisah ditiap tahapannya, antara pagu

indikatif di perencanaan dan rincian belanja di penganggaran tidak jarang ditemukan tidak kesesuaian data.
6. Dalam pengimplentasian sistem yang berjalan belum adanya pemanfaatan *log* dan *history* pada setiap tahapannya artinya tidak dapat diketahui siapa berbuat apa padahal pada tahap penganggaran hal ini harus dilakukan mengingat yang terjadi pada tahpan ini sangatlah sensitif.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:
1. Bagaimana perencanaan dan penganggaran pemerintah Kota Bandung yang sedang berjalan saat ini.
2. Bagaimana perancangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran di Pemerintah Kota Bandun.
3. Bagaimana perancangan antar muka dari Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran di Pemerintah Kota Bandung.
4. Bagaimana perancangan aristektur jaringan dari Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran di Pemerintah Kota Bandung.
5. Bagaimana hasil pengujian dari Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Kota Bandung.
6. Bagaimana impelementasi dari Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Kota Bandung.

Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk membangun Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Pemerintah Kota Bandung.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui perencanaan dan penganggaran pemerintah Kota Bandung yang sedang berjalan saat ini.
2. Untuk membuat perancangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran di Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk melakukan implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk melakukan pengujian terhadap Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Kota Bandung.

Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batasan diperlukan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak terlalu luas dan menjadi kurang efektif. Adapun batasan masalah pada penelitian ini diantaranya:
1. Pada tahapan musrenbang, hanya membahas usulan yang diusulkan melalui RW dan divalidasi kelurahan serta diterima oleh kecamatan atau SKPD. Usulan ini tidak membahas anggaran melainkan hanya sebatas volume dari apa yang diusulkan.
2. Pada tahapan reses, yang memberikan usulan hanya DPRD dan diterima atau tidaknya usulan dilakukan oleh SKPD serta tidak pula membahas pagu melainkan volume dari apa yang diusulkan.

3. Proses pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diakomodir hanya bersifat murni dari mulai proses usulan musrenbang hingga terbitnya peraturan daerah mengenai APBD.
4. Belanja langsung dibuat oleh kepala SKPD masing-masing perangkat daerah. Kepala SKPD mengatur maksimal dua staffnya untuk melakukan perincian terhadap belanja langsung. Selanjutnya, ketika perincian telah dilakukan, kepala SKPD melakukan validasi terhadap belanja langsung. Perubahan terhadap belanja langsung dapat dilakukan ketika belanja langsung tersebut tidak dikunci oleh penyelia.
5. Penyelia Bappelitbang hanya melakukan penguncian terhadap detail belanja langsung.
6. Penyelia Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset hanya melakukan penguncian terhadap rincian belanja langsung.
7. Belanja tidak langsung, pendapatan dan pembiayaan di *input* oleh TAPD. Belanja tidak langsung SKPD hanya dapat dilihat oleh SKPD yang bersangkutan, sedangkan pendapatan dan pembiayaan dapat dilihat oleh seluruh SKPD.
8. Musrenbang, reses dan belanja langsung dilaksanakan dengan menggunakan tahapan yang diatur waktunya oleh TAPD.
9. Pencetakan dokumen di setiap tahapan bisa dilakukan ketika setiap tahapan telah ditutup dan belanja langsung yang akan dicetak hanya yang telah divalidasi oleh kepala SKPD.
10. Pada penelitian ini belum mengakomodir dalam pengelolaan rekening serta komponen belanja langsung.

II. Kajian Pustaka

Sistem Informasi

Menurut Abdul Kadir sistem informasi adalah sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. [2]

Menurut Richardus Eko Indrajit sistem informasi adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. [3]

Dari dua pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwa sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling terintegrasi dan berhubungan satu sama lain dan bekerja sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masing untuk menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat bagi penggunanya.

Perencanaan

Alder menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya, kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya. [4]

Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat.

Penganggaran

Pengertian anggaran menurut Munandar adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. [5]

Anggaran juga dapat diartikan sebagai istilah perencanaan untuk pengendalian laba menyeluruh dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu anggaran sistematis dan formal untuk perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian tanggung jawab manajemen [6]

Menurut Nafarin anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa. [7]

Dari beberapa pengertian anggaran yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana kerja sistematis yang dinilai dengan uang yang dibuat dalam bentuk angka-angka serta disusun dalam suatu atau beberapa periode tertentu yang dipakai sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian yang terpadu dan pengendalian tanggung jawab manajemen melalui proses tertentu.

III. Objek dan Metode Penelitian

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan pokok masalah yang akan diteliti. Untuk itu, objek penelitian ini harus ditentukan pertama kali untuk menunjang penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang menjadi objek pada penelitian ini berada di Pemerintah Kota Bandung.

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempelajari langsung masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu objek penelitian tertentu.

Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber penelitian. Data primer didapatkan melalui metode wawancara atau *interview* dan pengamatan langsung atau observasi.

1. Wawancara

Pada metode ini, peneliti melakukan wawancara atau *interview* terhadap pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini spesifik kepada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tentang proses penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang diawali dengan tahapan musyawarah rencana pembangunan dan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Observasi
   Peneliti juga melakukan penelitian atau analisa langsung ke lapangan melalui tahapan observasi untuk memastikan bagaimana prosedur atau sistem yang sedang dijalankan.

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari data yang telah tersedia pada objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh peneliti meliputi struktur organisasi, tugas, fungsi, prosedur yang tertera dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, serta menganalisa sistem musrenbang *online*, reses *online*, RKPD *online* dan sistem informasi manajemen daerah atau SIMDA.

Metode Pendekatan Sistem

Metode pendekatan yang dipilih adalah metode pendekatan berbasiskan objek dimana kita mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya.

Alasan utama dipilihnya pendekatan ini karena yang dilakukan peneliti adalah mengembangkan satu sistem dan mengintegrasikannya ke dalam dua sistem lainnya, sehingga akan sangat mudah jika dibuat menjadi beberapa objek. Selain itu, karena ruang lingkup pengembangan sistem ini luas dan diperlukan pengembangan yang berkelanjutan, maka akan sangat tepat jika menggunakan pendekatan berbasiskan objek.

Metode Pengembangan Sistem

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan terhadap sistem, yaitu menggunakan pendekatan berbasis objek dengan metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode pengembangan *prototype*.

Alat Bantu Analisis dan Perancangan

Tool-tool atau alat bantu perancangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu use case diagram,activity diagram, sequence diagram, class diagram, object diagram, component diagram dan deployment diagram.

IV. Hasil Penelitian

Tujuan Perancangan Sistem

Pada dasarnya perancangan sistem dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan juga memberikan kemudahan terhadap pengguna dalam menjalankan sistem yang ada. Kemudahan tersebut disajikan dalam perancangan sistem ini, yang diantaranya:

Masyarakat dalam hal ini diwakili oleh RW dan DPRD dapat memberikan usulan secara *online* dan melakukan *tracking* terhadap usulan yang diberikan.

Perangkat daerah teknis yang melakukan proses perencanaan tidak lagi perlu merekap apa yang diusulkan masyarakat karena secara otomatis akan masuk kepada rencana kerja perangkat daerah.

Proses produksi rencana kerja perangkat daerah, kebijakan umum APBD, prioritas plafon anggaran, APBD dan dokumen lainnya tidak lagi di rekap secara konvensional karena disajikan melalui sistem yang dirancang.

Monitoring terhadap belanja perangkat daerah dapat dilakukan baik TAPD maupun pihak legislatif sehingga meminimalisir belanja yang tidak berpihak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Gambar : **Gambar 4.1**

Use Case Diagram

Berikut *use case diagram* Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah Di Pemerintah Kota Bandung :

Gambar : **Gambar 4.2**

Activity Diagram

Berikut *activity diagram* Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah Di Pemerintah Kota Bandung :

1. *Activity diagram* Perncanaan
   Gambar: **Gambar 4.3**
2. *Activity diagram* Penganggaran
   Gambar: **Gambar 4.9**

Sequence Diagram

Berikut *activity diagram* Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah Di Pemerintah Kota Bandung :

1. *Sequence diagram* Perncanaan
   Gambar: **Gambar 4.11**
2. *Sequence diagram* Penganggaran
   Gambar: **Gambar 4.15**

Perancangan Data

Class Diagram

Berikut adalah *class diagram* Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah Di Pemerintah Kota Bandung .
Gambar: **Gambar 4.17**

Object Diagram

Berikut adalah *object diagram* Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah Di Pemerintah Kota Bandung .
Gambar: **Gambar 4.18**

Deployment Diagram

Berikut adalah *deployment diagram* Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah Di Pemerintah Kota Bandung .
Gambar: **Gambar 4.19**

Component Diagram

Berikut adalah *deployment diagram* Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah Di Pemerintah Kota Bandung .
Gambar: **Gambar 4.20**

V. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Perencanaan dan penganggaran pemerintah Kota Bandung yang sedang berjalan ketika sebelum penelitian ini dilakukan belum terintegrasi, artinya alur pengiriman antar sistem masih menggunakan metode konvensional.
2. Proses perencanaan dan penganggaran pemerintah Kota Bandung dari beberapa tahapan pada penelitian ini dirancang terintegrasi melalui sistem informasi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
3. Perancangan antar muka sistem informasi perencanaan pembangunan dan penganggaran dibuat dengan memperhatikan *user experience* karena pengguna dari sistem tidak seluruhnya terbiasa menggunakan suatu aplikasi.
4. Arsitektur jaringan dibuat menggunakan metode *client server* dan aplikasi yang berbasis *web*, sehingga tidak ada lagi batasan ruang dan waktu dalam menggunakan sistem informasi perencanaan pembangunan dan penganggaran ini.
5. Aplikasi yang dikembangkan telah dilakukan pengujian, sehingga dapat dipastikan kesesuaian antara aplikasi dengan fungsi yang dibutuhkan dan juga peraturan perundang-udangan.
6. Pengimplementasian sistem informasi perencanaan pembangunan dan penganggaran di pemerintah Kota Bandung dilakukan dengan mengembangkan aplikasi yang mencakup seluruh fungsi dari sistem informasi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Saran

Sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang penulis kembangkan ini tentunya masih banyak kekurangan salah satunya adalah masalah manajemen komponen dan rekening. Untuk itu penulis berharap, penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan kembali. Beberapa poin yang disarankan penulis diantaranya:

1. Penggunaan sistem musrenbang dan reses berbasiskan *mobile* agar memudahkan masyarakat dalam memberikan usulan dan juga pemanfaatan teknologi *sms gateway* dalam memberikan notifikasi apakah usulan diterima atau tidak.
2. Pengembangan manajemen rekening dan komponen terutama untuk komponen yang memiliki kategori HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) dan ASB (Analisis Standar Belanja) agar belanja lebih terperinci lagi.

3. Pengembangan sistem statistik yang menampilkan hasil dari perencanaan agar dapat terlihat bagaimana pergerakan anggaran belanja dan pendapat di setiap tahunnya.
4. Integrasi dengan sistem penatausahaan yang dibuat untuk melakukan pencairan anggaran serta integrasi dengan sistem pengadaan barang dan jasa. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi *double input* yang dilakukan SKPD dan juga untuk memastikan bahwa perencanaan terrealisasi dengan benar.
5. Integrasi dengan sistem monitoring dan evaluasi serta pelaporan pertanggungjawaban pimpinan daerah agar terlihat bagaimana realisasi anggaran di akhir tahun dari apa yang telah direncanakan diawal.

VI. Daftar Pustaka

[1] A. Kadir, Pengenalan Sistem Informasi, Yogyakarta: Andi, 2003.

[2] R. E. Indrajit, Konsep Dasar Manajemen Sistem Informasi dan, Jakarta: Elex Media Komputindo., 2000.

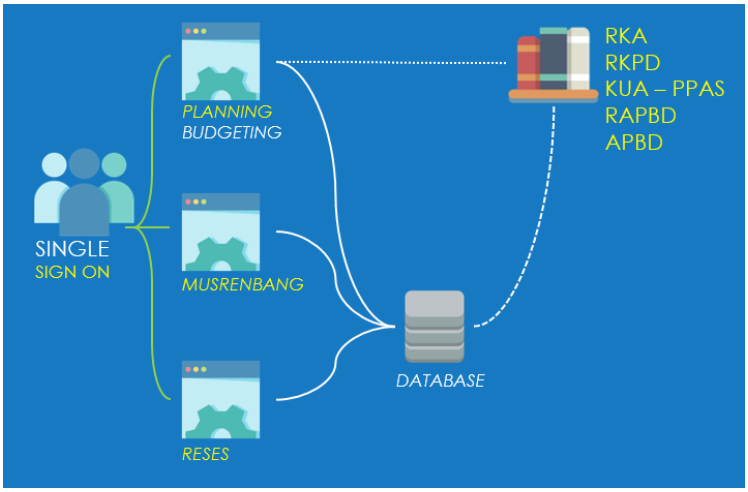
[3] J. Alder, Coastal planning and management, 1999.

[4] M. Munandar, Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoodinasian Kerja, Yogyakarta: BPFE UGM, 2001.

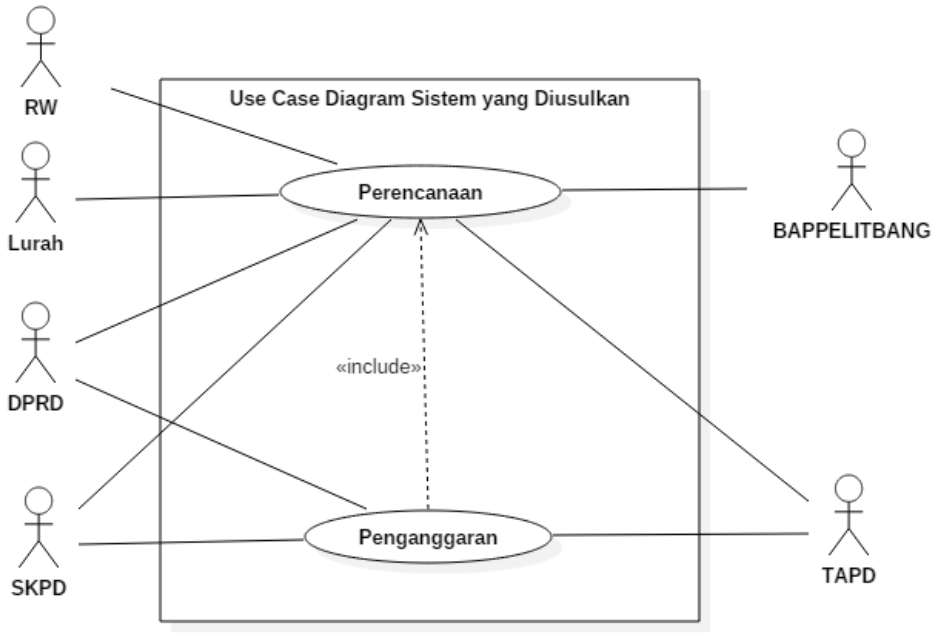
[5] W. G. A, Anggaran Perencanaan dan Pengendalian, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

[6] M. Nafarin, Penganggaran Perusahaan, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

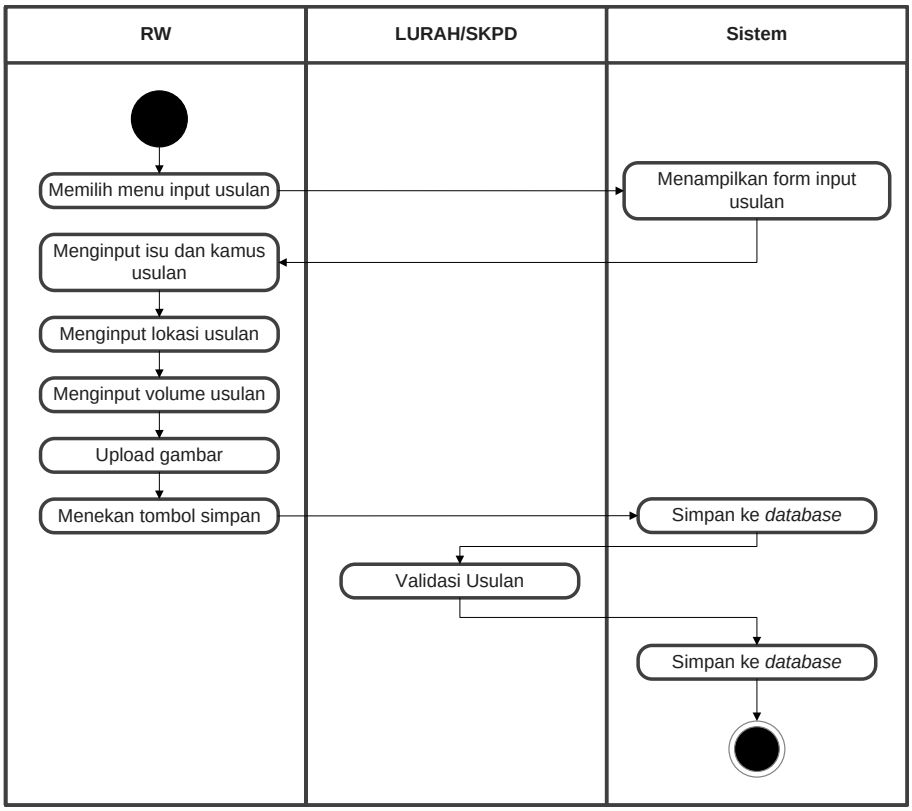
Gambar 4.1 Gambaran umum sistem



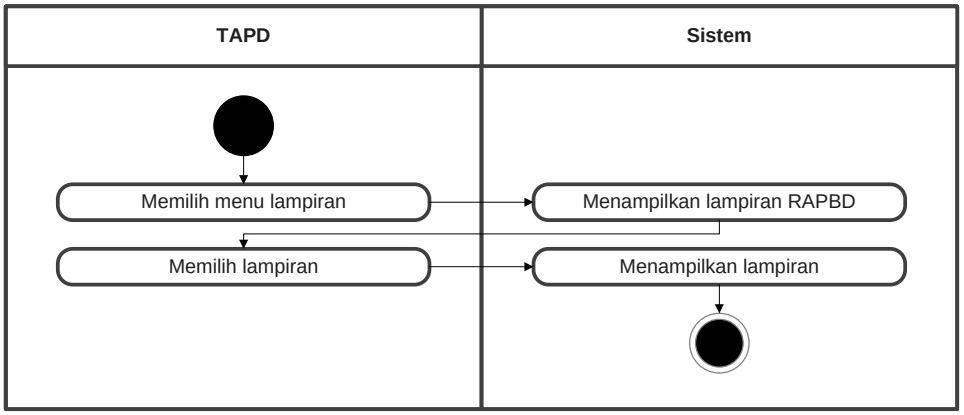
Gambar 4.2 *Use case* diagram



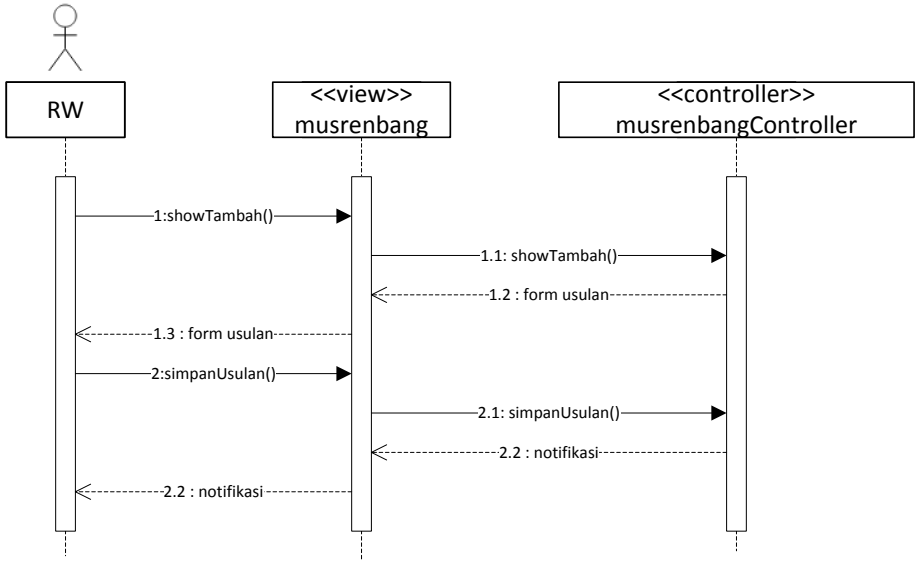
Gambar 4.3 *Activity diagram* Perncanaan



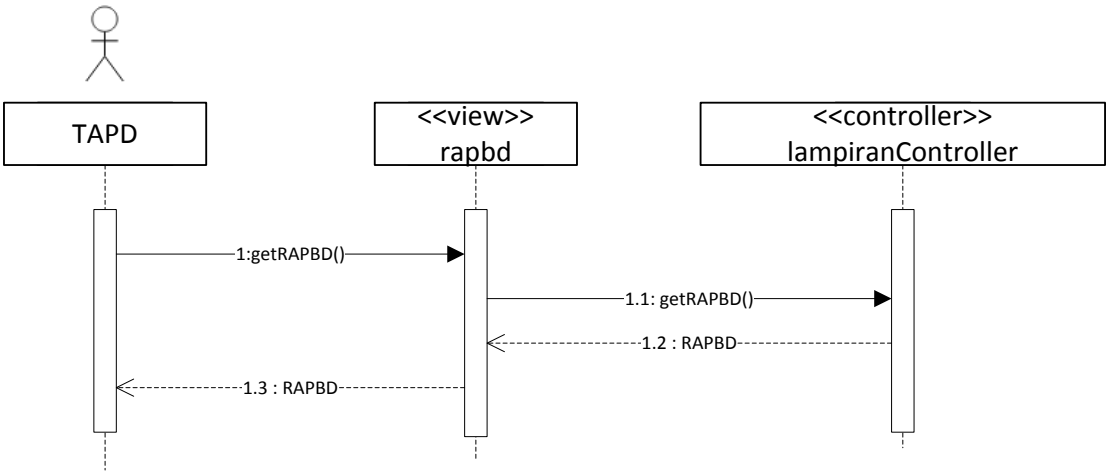
Gambar 4.9 *Activity diagram* Penganggaran



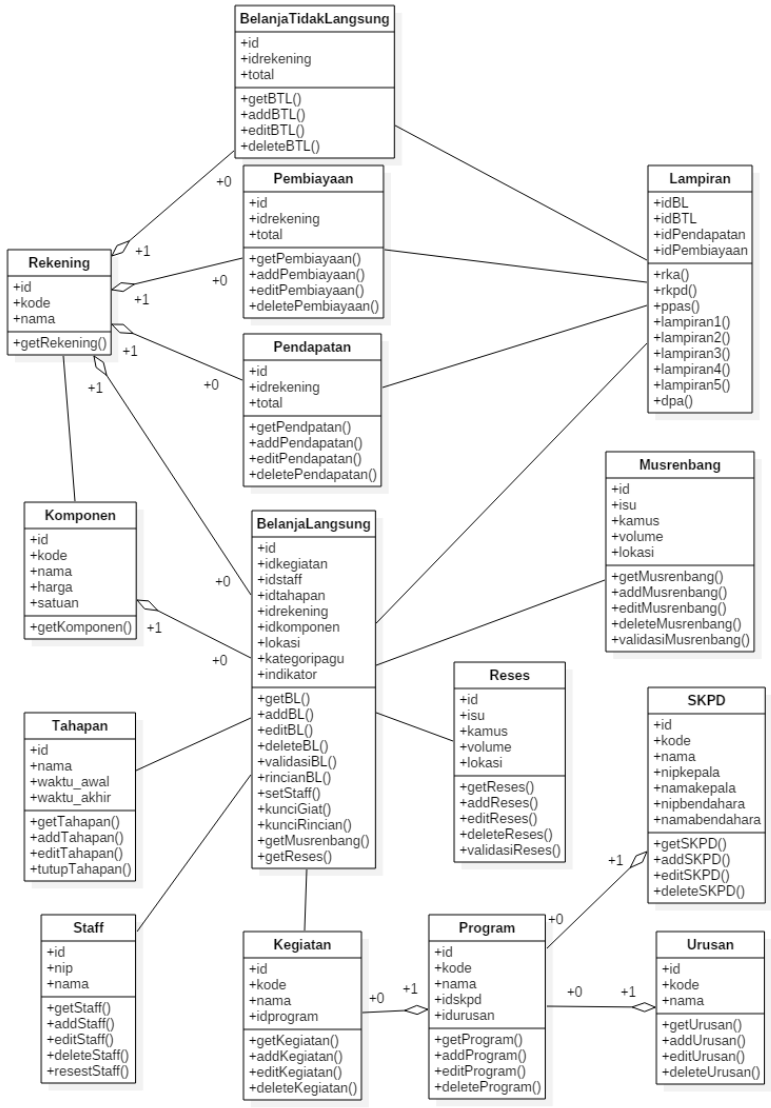
Gambar 4.11 *Sequence diagram* Perncanaan



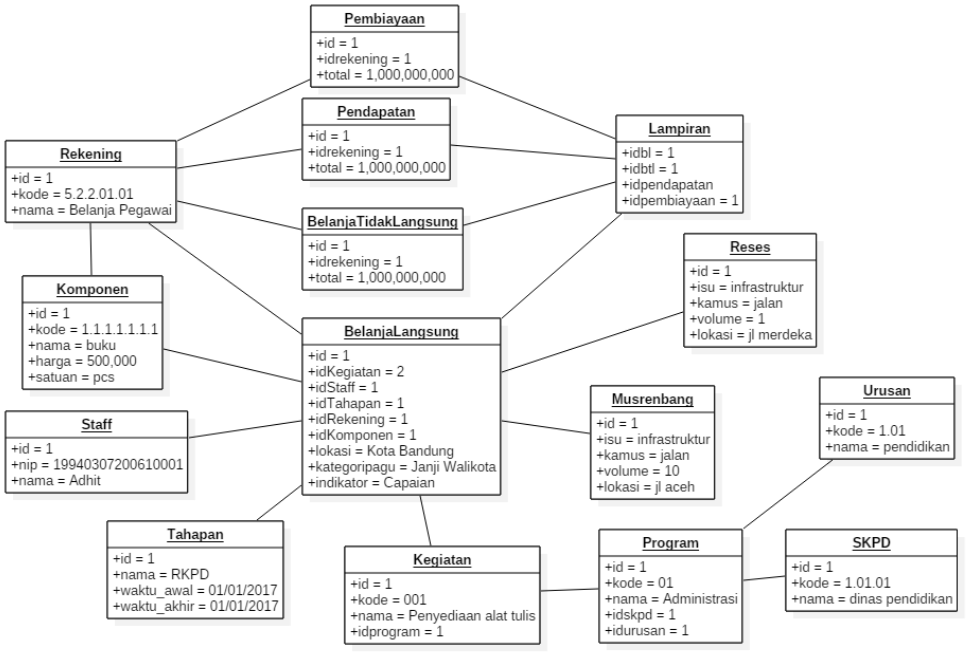
Gambar 4.15 *Sequence diagram* Penganggaran



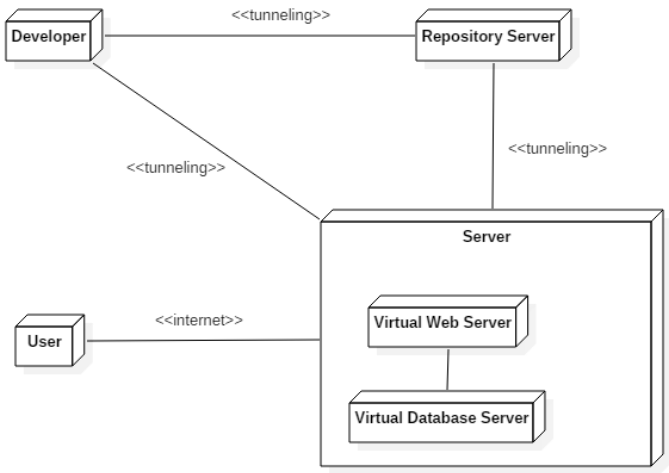
Gambar 4.17 ***Class diagram***



Gambar 4.18 ***Object diagram***



Gambar 4.19 ***Deployment diagram***



Gambar 4.20 ***Component diagram***

